

Abstrak

Perdebatan mengenai karya klasik Michels tentang 'hukum besi oligarki' dan relevansinya dalam politikan Indonesia kontemporer sepertinya lepas dari pengamatan para ilmuwan Politik. Studi ini merupakan upaya penulis untuk mencari justifikasi empiris terhadap teori Michels tersebut dalam lokus partai politik. Partai politik sebagai linkage utama dalam demokrasi ternyata terjebak dalam perangkap hukum oligarkhi Michels. Masuknya pengusaha ke partai politik ternyata berhubungan dengan hirarki kelembagaan yang di dalam partai politik dan semakin memuluskan transaksi kepentingan diantara mereka.

Studi ini menggunakan metode studi kasus untuk mengamati peran pengusaha di lingkaran Partai Kebangkitan Bangsa. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan didukung oleh metode triangulasi sumber.

Temuan menarik penelitian ini ialah bahwa sejak kelahirannya PKB sudah memiliki nuansa oligarkis yang dibangun berdasarkan patronase kyai-kyai NU. Transformasi kekuasaan dari Gus Dur ke Muhaimin Iskandar merupakan peralihan dari satu oligark ke oligark lain. Fenomena baru masuknya Rusdi Kirana ke PKB menunjukkan bahwa sumber daya kuasa finansial ternyata mampu menembus jalur oligarki di PKB.

Kata Kunci: Pengusaha, Partai Politik, Oligark, Modal

Abstract

The debate on Michel's classic work 'iron law of oligarchy' (1911) and its relevance in Indonesian politics seems to have been considered as obsolete by academics and scholars. This study is an attempt to discover empirical evidence on Michel's classic work within the locus of political parties in Indonesia. Political party as the main linkage of democracy has been trapped in the Michel's law of oligarchy. In line with Michel, I argue that the entry of businessman into political party is linked with the existence of oligarchy within party organization.

This study uses qualitative case study method and descriptive analysis to observe the role of businessman within the inner circle of the National Awakening Party. It utilizes in-depth interview and literary study as the data collection method, while data source triangulation is used to check the validity of the data.

To sum up, this research finds out that since its early beginning the National Awakening Party has oligarchic nature which is built around the patronage of Kyai (Javanese Ulama). The transformation of power from Abdurrahman Wahid to its new leader Muhaimin Iskandar constitutes the transition of oligarchic leader. After that the new phenomenon arises when Rusdi Kirana with its financial power has the ability to penetrate the old oligarchical nature of the National Awakening Party.

Keywords: *Businessman, Political Party, Oligarch, Capital*



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**OLIGARKHI PARTAI POLITIK DAN PENGUSAHA (STUDI KASUS RUSDI KIRANA DI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA)**

THERESIA AYUNIA N.L, Dra. Ratnawati, SU

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>